

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul Gafur Ansori. 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Sliran dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Gajah Mada.
- Achmad Ruslan. 2011. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- E. Fernando M Manullang. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Kompas.
- FX. Djumialdji. 2005. *Perjanjian Kerja, Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka yustitia.
- Hyronimus Rhiti. 2011. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- H.A.R. Tilaar. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mira Buana Media.
- Karen Leback. 2018. *Teori-Teori Keadilan, Cetakan ke-6*. (terjemahan Yudi Santoso). Bandung: Nusa Media.

- Laica Marzuki. 2005. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Mahmud. 2011. *Sosiologi Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2006. *Kitab undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Samsul. 2002. *Filsafat Pendidikan Nasional*, Jakarta: Ciputat Press.
- Sastra Djatmika dan Marsono. 1995. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- _____. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sentosa Sembiring. 2005. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____. 2018. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.

Sri Hartini dan Tedi Sudrajat. 2017. *Hukum Kepegawaian di Indonesia, Edisi Ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suwarto. 2003. *Hubungan Industrial Dalam Praktek*. Jakarta: Penerbit Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia (AHII).

Syamsudin Pasamai. 2007. *Metode Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Makassar: PT. Uitoha.

Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2008. *Buku Ajar Hukum Perburuhan*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Titik Tri Wulan. 2010. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Jurnal

Made Aditya Pramana Putra. 2020. *Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Jurnal Perlindungan Hukum. Volume 5. Nomor 3.

Isnaini Maratus Sholihah, Sumardi, dan Ahmad, Juni 2023. *Evaluasi Rekrutmen ASN PPPK Jalur Formasi Guru*. Jurnal Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Borneo. Volume 4. Nomor 2.

Tita Tri Antika Pangestuti, *et. al.*, 2021. *Permasalahan Guru Honorer Terkait Kebijakan Penghentian Rekrutmen Guru PNS Menjadi PPPK*. Jurnal Inovasi Penelitian. Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Volume 2. Nomor 4.

Wasisto Raharjo. 2015. *Analisis Status, Kedudukan, dan Perjanjian Pegawai Tidak Tetap dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Jurnal Borneo Administrator. Lembaga Administrasi Negara. Volume 11. Nomor 1.

Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari. 2017. "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat". Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.17, Nomor 1.

Zulhijjayanti. 2022. *Diskursus Profesi Guru Yang Berstatus PPPK Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Jo. Putusan MK No.9/PUU-XVIII/2020*. Jurnal Al-Qisth Law Review. Volume 6. Nomor 1.

Tesis

Amina Sukmayanti. *Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Halmahera Timur*. Tesis pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2021.

Indah Putri Jayanti Basri, 2023, *Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Postingan Media Sosial yang Telah Dihapus)*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Marsha Chikita Widyarini. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dengan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Fajar Graha Pena di Kota Makassar*. Tesis pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2020.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pemerintah Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 981 Tahun 2021 tentang Persyaratan, sertifikasi, dan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2021.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekasnime Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 634 Tahun 2024 tentang Kriteria Pelamar Pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Bagi Tenaga Non-ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelamar Pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Bagi Tenaga Non-ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN

dan Mekanisme Pengelolaan Nilai Hasil Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

Surat edaran dengan nomor B/185M.SM.02.03/2023 mengenai Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diundangkan pada 31 Mei 2022.

Internet

Abdul Rozak. *Nasibmu Guru Sebagai ASN PPPK Bukan ASN PNS*. <https://fitk.uinjkt.ac.id/nasibmu-guru-sebagai-asn-pppk-bukan-asn-pns/>. Diakses pada 28 juli 2023.

CNBC Indonesia, Cek Daftar Gaji Guru SD dan PNS terbaru 2022 <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220802142341-72-360498/cek-daftar-gaji-guru-sd-dan-pns-terbaru-2022>

Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer menjadi ASN. Diakses dari <https://law.ui.ac.id/pengangkatan-guru-dan-tenaga-kependidikan-honorer-menjadi-asn-oleh-prof-anna-erliyana/>.

PGRI Harap Guru Swasta yang jadi PPPK bisa kembali ke sekolah asal. Diakses dari <https://www.tempo.co/politik/pgri-harap-guru-swasta-yang-jadi-pppk-bisa-kembali-ke-sekolah-asal-116408>.

Potensi Krisis Jumlah Guru Berkualitas Harus Diantisipasi dengan Tepat. Diakses dari <https://mpr.go.id/berita/Potensi-Krisis-Jumlah-Guru-Berkualitas-Harus-Diantisipasi-dengan-Tepat>.

Reri Alfian, Jangan diterima kalau kurang, Segini gaji guru honorer menurut peraturan [perundang-undangan](https://rakyatempatlawang.bacakoran.co/read/9834/jangan-diterima-kalau-kurang-segini-gaji-guru-honorer-menurut-peraturan-perundang-undangan/15) <https://rakyatempatlawang.bacakoran.co/read/9834/jangan-diterima-kalau-kurang-segini-gaji-guru-honorer-menurut-peraturan-perundang-undangan/15>

Yanuar Agung Anggoro dan Sarah Nurainy Bouty. *Menuntaskan Rekrutmen Satu Juta Guru*. Humas Sekretariat Kabinet RI <https://setkab.go.id/menuntaskan-rekrutmen-satu-juta-guru/>. Diakses pada 3 April 2023.